

Wacana Homoseksualitas dalam Perspektif Kontemporer

(Satu Kajian Filsafat dan Hubungan Internasional
terhadap Homoseksualitas di Belanda)

22

WISNU ADIHARTONO REKSODIRDJO

Alumnus PSKWE-PPs UI

Abstract

Since the sexual revolution began in Europe, the sexual discourse i.e. homosexuality, lesbianism, bisexuality and transexuality could be a scientific discourse and many scholars start doing research this area. The development of sexual revolution is also bring up the movement of homosexual revolution communities. This thesis describe and analyze the Same Sex Marriage Policy in the Netherlands, Belgium and Spain from the international perspective. The Netherlands is one of the European states which is having a free and liberal sexual tradition because the government could accommodate the sexual attitude into non-bias gender policy. The legalization of homosexuality in the Netherlands took by the French through "French Napoleonic Code at 1811. The code explained that the liberation and marriage of homosexuality is guarantee by policy. This Code is follow by the Dutch government and they make a non-bias gender policy such as Same Sex Marriage Policy and also Prostitution Policy. From the democracy theory, it is visible that the Netherlands have a "Sexual Social Democracy" because they give the tolerance for the another aspiration, expression, the difference and human rights. The liberal democration in the Netherlands, it should be like a pioneer for the other European countries. After Dutch government legalize the Same Sex Marriage Policy in 2001, Belgium is also legalize it in 2003. One of the European countries which is surprised all over the world is Spain. Spain is the country in the Mediterranean bay which have a strong Catholic tradition, but the Spanish government could accommodate the homosexual communities with the Same Sex Marriage Policy in 2005.

Keywords: sexual revolution, legalization of homosexuality, non-bias gender policy

Pendahuluan

Apa jadinya apabila kebebasan seksual, dalam hal ini masalah preferensi seksual di suatu negara

diakomodir dan dilegalisasi negara melalui kebijakan-kebijakannya? Apakah pemerintah sudah tidak mempunyai isu-isu yang lebih penting daripada mengurus masalah preferensi seksual warganya? Apakah ini yang dinamakan dengan demokrasi yang keablasan? Jawabannya ternyata tidak!

* Tulisan ini berdasar tesis penulis dengan judul yang sama pada Program Studi Wilayah Eropa Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Bagi negara-negara Eropa di bagian Barat dan Utara, diskursus seksualitas apapun itu permasalahannya menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Bagi mereka, diskursus preferensi seksual sama saja dengan mempertaruhkan nyawa untuk memperlihatkan bahwa negara mereka sangat menghormati hak-hak asasi manusia. Apabila kita melihat satu persatu kebijakan gender di setiap negara di Eropa, khususnya di Eropa Barat dan Utara, memang masih terlihat adanya kebijakan tambal sulam mengenai masalah preferensi seksual. Masalah-masalah seksualitas sempat menjadi polemik tersendiri antara kelompok agama, kelompok pengusung hak asasi manusia, dan kelompok feminis. Akan tetapi, ada juga negara-negara di Eropa yang sangat mengakomodir masalah preferensi seksual mereka dengan mengeluarkan kebijakan seperti Undang-Undang Pernikahan Sejenis, kebijakan hak yang sama seperti pasangan heteroseksual, kebijakan hak mengadopsi anak bagi pasangan sejenis, dan lain-lain.

Negeri Belanda merupakan negara di kawasan Eropa yang memiliki tradisi seksual yang bebas dan rapi. Berbagai bentuk perilaku-prilaku sosiologi seksual seperti homoseksual-lesbianisme dan pros-titusi dan lain sebagainya ternyata telah diakomodir sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda melalui kebijakan-kebijakannya. Demikian pula dengan Belgia dan Spanyol yang ternyata juga berani

mengakomodir masalah preferensi seksualnya ke dalam bentuk suatu kebijakan. Sebenarnya ada apa dengan negara-negara di Eropa yang begitu berani mengeluarkan diskursus seksualitas dari sebuah kotak yang tertutup rapat dan tabu untuk diperbincangkan? Saya berani mengatakan bahwa konteks penyebab dari terakomodirnya perilaku-prilaku tersebut adalah akibat munculnya revolusi seksual di kawasan Eropa pada dekade 1960-an.

Etika Viktorian dan Munculnya Revolusi Seksual

Secara umum, dari tahun 1900 hingga pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, etika seksual yang berlaku saat itu adalah etika Victorian. Etika seksual ini menegaskan perbedaan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan pada apa yang diyakini sebagai kepantasan. Citra seorang perempuan pada masa Victorian digambarkan sebagai sosok yang suci, patuh dan dilindungi oleh suami yang baik.¹ Etika Victorian ini kemudian mendapat kritikan dari perempuan sendiri karena etika ini membuat perempuan hanya menjadi obyek di bawah subyek laki-laki. Kritikan-kritikan terus berlanjut sehingga muncul suatu gerakan pembebasan seksual atau revolusi seksual untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

¹ C.Y. Marselina Nope, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, (Yogyakarta : Resist Book, 2005), hal. 115.

Seks berdasarkan sejumlah kenyataan yang ada menciptakan suatu wacana yang tidak sekedar tentang moral tetapi juga tentang rasionalitas. Seks harus sudah mulai dibicarakan, harus dibahas secara terbuka, dan dengan cara yang tidak terbatas pada perbedaan antara halal dan haram. Seks harus dibicarakan tidak hanya untuk dikutuk tetapi untuk ditoleransi dan diatur yang nantinya berfungsi semaksimal mungkin bagi masyarakat.² Sehingga, revolusi seksual diartikan sebagai suatu bentuk tindakan liberal di mana seks secara eksplisit didiskusikan melalui buku dan media lainnya yang isinya berisi tentang pembebasan perempuan untuk dapat mengontrol tubuhnya sendiri atau politik tubuh, masalah pernikahan antar sesama jenis, prostitusi, serta penemuan teknik-teknik baru dalam melakukan hubungan seksual dengan oral seks, masturbasi, anal seks, dan sebagainya.³

Kate Millett dalam bukunya *Sexual Politics* mendefinisikan revolusi seksual sebagai hal yang membawa berakhirnya institusi yang bersifat patriarki, sekaligus menghilangkan ideologi supremasi laki-laki dan juga menghilangkan aktifitas-aktifitas sosialisasi yang tradisional dalam bidang status, peranan, dan tempe-

ramen. Hal inilah yang akan membuat suatu integrasi subkultur yang akan menghilangkan gesekan-gesekan di antara perbedaan seksual yang ada.⁴ Dari dua definisi tentang revolusi seksual, maka ia dapat diidentifikasi sebagai revolusi yang memiliki sifat non-kekerasan.⁵ Dengan demikian bahwa revolusi seksual dapat memberikan suatu cara pandang bahwa Eropa pada umumnya dan Belanda pada khususnya merupakan negara yang menganut ideologi liberalisme, di mana di dalam masyarakatnya terdapat sikap-sikap *permissive* untuk dapat menerima kebebasan seksual.⁶ Oleh karena itu,

⁴ Pernyataan Kate Millet disadur dalam Dennis Altman, "Liberation: Toward the Polymorphous", dalam Jeffrey Escoffier, (ed.), *Sexual Revolution*, (New York: Thunder's Mouth Press, 2003), hal. 617.

⁵ Kermit Mehlinger, M.D., "The Sexual Revolution", dalam Ibid, hal. 43.

⁶ Terjadinya eksperimen-eksperimen seksual yang dilakukan oleh kaum homoseksual-lesbian dan perempuan pekerja seks menimbulkan tumbuh dan menjamurnya produksi kondom untuk mencegah kehamilan dan penyakit-penyakit seksual, selain itu juga tumbuh industri pembuatan pil untuk membantu mereka yang di "vonis" mengalami impotensi, dan dijualnya boneka-boneka seks untuk pemuas nafsu. Revolusi seksual juga mengakibatkan masyarakat lebih toleran terhadap tayangan tv yang memperlihatkan tubuh laki-laki dan perempuan setengah telanjang, dari sirilah lalu muncul nama-nama bintang film yang pada saat itu dianggap bom seks seperti Marilyn Monroe, Raquel Welch, Brigitte Bardot, Jane Fonda, Sophia Loren, Madonna, dan lain sebagainya, lihat Ibid.

² Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan, Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 26 - 27.

³ www.wordiq.com/definition/Sexual_revolution diakses pada tanggal 21 November 2004.

negara harus mengetahui keadaan seks warganya dan bagaimana warga tersebut mendayagunakan seks.

Revolusi seksual otomatis memunculkan gerakan revolusi kaum homoseksual dan lesbian yang menginginkan adanya pengakuan identitas diri mereka. Gerakan homoseksual dimulai pada sekitar tahun 1950-an di kota Amsterdam, Paris, dan Kopenhagen, tahun 1970-an di Jerman dan Inggris, tahun 1980-an di Spanyol setelah tergulingnya kekuasaan Jenderal Franco dan tahun 1989-an di Eropa Timur setelah runtuhnya kekuasaan Uni Soviet.⁷ Pada perkembangannya, gerakan homoseksual tersebut akhirnya berimbas di seluruh belahan dunia di mana muncul tempat-tempat yang dikhususkan bagi kaum *gay* sebagai perwujudan dari eksisnya identitas mereka.⁸ *Queens* dan *Sissies*⁹ mulai bermunculan, begitu juga dengan maraknya *gay man leather*¹⁰ yang ditandai dengan kostum kulit, *macho*, dan selalu berkumpul di dalam sauna

khusus *gay* dan *dark rooms*.¹¹ Selain itu, identitas *gay* ditandai dengan pemakaian obat-obatan terlarang di seluruh diskotik khusus *gay* pada era tahun 1970-an dan 1980-an. Tempat-tempat khusus atau *gay's ghetto* tersebut sengaja dibuat karena mereka adalah kaum yang di kutuk dan dibenci oleh lingkungan sekitar dan keluarganya sehingga mereka mempunyai tempat untuk mengekspresikan keinginan-keinginannya.¹²

⁷ Data menunjukkan bahwa menurut hasil survey Asosiasi Internasional Gay dan Lesbian (the International Lesbian and Gay Association's) kegiatan seks sesama jenis merupakan hal yang ilegal di beberapa negara, seperti Algeria, Bangladesh, Barbados, Iran, Maroko, Pakistan dan Tunisia, Armenia, Myanmar, Jamaica, Kenya, Malaysia, Nigeria, dan Singapura, tetapi di Siprus dan Bosnia-Herzegovina pada tahun 1990-an kegiatan seks sesama jenis sudah di dekriminialisasikan, lihat Jon Binnie, *The Globalization of Sexuality*, (SAGE : London, 2004), hal.13.

⁸ Sebagai tambahan, di Amerika gerakan homoseksual merebak pada tahun 1969 dan dirayakan setiap tanggal 27 Juni dengan diadakannya parade Stonewall dan hari Christopher Street, lihat Martin Duberman, *Stonewall*, (New York : Dutton, 1993), hal 56. Bagi aktifis *gay* Perancis, Guy Hocquenghem, tahun 1960-an dan 1970-an merupakan kesempatan bagi kaum homoseksual untuk melakukan revolusi keinginan (*revolution of desire*) karena selama ini ditekan oleh pemerintah, lihat Stephen Garton, *Histories of Sexuality, Antiquity to Sexual Revolution*, (London : Equinox, 2004), hal. 211. Penulis menemukan kembali sebuah data yang mengatakan bahwa organisasi *gay* pertama justru lahir di Jerman pada pertengahan abad ke-19 akan tetapi gagal bertahan karena terkena imbas kemunculan ideology nazisme dan stalinisme, lihat Surya Monro, *Gender Politics, Citizenship, Activism and Sexual Diversity*, (London : Pluto Press, 2005), hal. 130 - 131.

⁹ Dalam tulisan ini, dua istilah tersebut tidak akan diganti, bila diterjemahkan secara bebas maka akan menghasilkan terjemahan banci dan waria.

¹⁰ Peneliti tidak akan menerjemahkan *Gay Man Later*. Istilah ini menunjuk kepada mereka yang memiliki kecenderungan *gay* tetapi masih seperti laki-laki.

Heteronormativity dan Munculnya Diskursus *Homophobia*

Meskipun demikian, gerakan homoseksual juga tidak begitu saja tidak mendapat tantangan dari gerakan-gerakan yang menamakan dirinya gerakan anti-homoseksual. Menurut para anti-homoseksual, homoseksualitas termasuk dalam kategori yang direproduksi sebagai hal yang bersifat *sexually deviant* atau kegiatan seksual yang menyimpang dan pada gilirannya nanti akan menjadi ancaman terhadap bangsa karena masalah moralitas suatu bangsa. Diskursus-diskursus kegiatan seksual menyimpang ini direproduksi bukan untuk kepentingan kelompok marginal sehingga hal ini tentu saja mengganggu perihal identitas kaum homoseksual karena mereka hidup di dalam suatu lingkungan yang *heteronormativity*.¹³

Norma ini menjelaskan dan menerapkan prinsip bahwa heteroseksualitas adalah suatu norma dan homoseksualitas adalah pilihan kelas dua. Norma ini juga membuat dikotomi publik dan privat di mana kaum heteroseksual diperlakukan sama tanpa diskriminasi di semua lingkup kegiatan, sementara kaum homoseksual hanya diperbolehkan menduduki bidang-bidang yang personal dan privat. Heteroseksualitas bukan hanya dibedakan melainkan juga dianggap lebih tinggi derajatnya atas praktik nonhetero. Selain itu, bentuk seksualitas yang demikian diberi sebutan negatif, direndahkan, abnormal dan kriminalisasi, bahkan yang lebih mengerikan lagi kaum homoseksual distigmakan menjadi kaum yang hiperseks, immoral, berbahaya dan menjadi suatu ancaman karena sulit dikontrol keberadaannya.¹⁴

Maka dalam kerangka itulah, heteroseksualitas dianggap sebagai seksualitas yang baik, normal, dan diberkati, sedangkan yang lain adalah seksualitas yang buruk, abnormal, tidak alamiah, dan terkutuk.¹⁵ Pernyataan ini melahirkan tiga pandangan tentang hubungan sesama jenis atau *same-sex relations*, yaitu *pertama*, homoseksualitas sebagai immoral, *kedua*, homoseksualitas sebagai hal yang tidak religius oleh karenanya melawan takdir Tuhan,

¹¹ *Dark Room* atau kamar gelap adalah kamar-kamar yang disediakan khusus di bar gay dan sauna bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan coitus.

¹² Akan tetapi kecenderungan baru muncul dimana pada tahun 1990-an, kaum homoseksual mulai tidak mengindahkan "kode etik" *gay's sexual pleasure* dengan tidak menggunakan kondom selama melakukan hubungan seks, lihat Ronald Bayer dan Gerard M. Oppenheimer, *AIDS : Voices from the Epidemic Doctors*, (New York : Oxford University Press, 2000), hal. 180.

¹³ Moh Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, (Yogyakarta : LKIS, 2004), hal. 91.

¹⁴ Op.cit., Jon Binnie, hal. 13 - 15.

¹⁵ Op.cit., Moh Yasir Alimi, hal. 38 - 39.

dan ketiga, anak-anak yang dipelihara pasangan gay dan atau lesbian tidak akan bahagia. Mengenai pernikahan sejenis, maka Bertens mengatakan bahwa membuka lembaga perkawinan untuk kaum sejenis mengandung kontradiksi besar, karena perbedaan jenis kelamin justru termasuk hakikat hubungan perkawinan itu sendiri. Mengakui perkawinan homoseks sama dengan menjungkirbalikkan hukum kodrat dan karena itu mengacau-balaukan tatanan moralitas sehingga memunculkan *national panic*.¹⁶ Oleh karena alasan-alasan tersebut maka beberapa negara merubah peraturan hukum mereka untuk mengenakan pola diskriminasi terhadap kaum homoseksual dan men-cap homoseksualitas sebagai tindakan kriminal.

Penentangan terhadap *Homophobia*

Munculnya norma ini kemudian ditentang oleh kaum homoseksual yang pada akhirnya membuat negara-negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Spanyol melakukan tindakan de-kriminalisasi kaum homoseksual dan menyatakan hal seperti homoseksualitas sebagai ekspresi hak asasi manusia.¹⁷ Menurut

mereka, seksualitas bukan saja selalu dihubungkan dengan masalah seks semata-mata karena seks justru didasari kepada rasa percaya dan nyaman di antara dua insan manusia. Seks diharapkan dapat mencapai satu tujuan yaitu *telos* di mana kepercayaan dan kenyamanan dapat menjadi satu.¹⁸ Selain itu, protes-protes mereka juga berkenaan dengan masalah bagaimana identitas homoseksual dapat dimunculkan di media massa dan di jalan-jalan, jaminan sosial, pemberantasan kekerasan terhadap kaum homoseksual, jaminan kesehatan, diizinkan-nya kaum homoseks untuk dapat masuk dalam bidang militer, dan yang paling penting adalah masalah pelegalisasian pernikahan sejenis. Hal

Media-media juga memunculkan tokoh-tokoh gay seperti Wilde, Proust, Rock Hudson, Pasolini, Almodóvar, Alan Turing, Foucault, Warhol, Bowie, dan lain-lain, lihat Op.cit, Martin Duberman, hal. 90.

¹⁶ John Amstrong, *Conditions of Love, The Philosophy of Intimacy*, (England : Penguin Books, 2002), hal. 135 - 136. Sebagai tambahan, dalam filsafat Cinta dinyatakan bahwa cinta adalah sebuah aktifitas; cinta selalu bersifat "berdiri dalam" dan bukan "jatuh untuk". Dalam bentuk yang paling umum, karakter cinta dapat dijelaskan lewat pernyataan bahwa cinta pertama-tama adalah persoalan "memberi" dan bukan "menerima". Karakter cinta yang lain adalah perhatian, tanggung jawab, penghargaan serta pemahaman. Cinta akan dianggap tidak ada jika tidak ada karakter-karakter ini, lihat Erich Fromm, *The Art of Loving*, terj. Syafi' Aliel'ha, (Jakarta : Fresh Book, 2004) hal. 37 - 47.

¹⁶ Ibid, hal. 103.

¹⁷ Protes-protes mereka ditandai dengan hadirnya drama-drama, drama komedi dan *sit-com* yang memunculkan sosok kaum gay, selain itu para sutradara juga membuat film yang memiliki *mainstream* gay, seperti Philadelphia pada tahun 1994, *Gods and Monster* tahun 1998, dan *Queer as Folk* tahun 1999.

inilah yang menyebabkan maraknya kemunculan *society-society* yang berhubungan dengan masalah pembebasan kaum homoseksual, di mana *sexual permissiveness* dijadikan sebagai diskursus toleransi ekspresi-ekspresi seksual kaum homoseksual yang menginginkan adanya identitas homoseksual.¹⁹ Oleh karena itu, Karl Ulrichs mengatakan bahwa homoseksualitas merupakan model seks jenis ketiga selain heteroseksual dan transeksual.²⁰

Selain itu muncullah istilah *Plastic Sexuality* atau Seksualitas Plastik oleh Anthony Giddens yaitu suatu bentuk seksualitas tak terpusat yang terbebas dari kebutuhan-kebutuhan reproduksi.²¹ Seksualitas bentuk ini melahirkan adanya gagasan perkawinan sebagai kontrak ekonomi dan pengingkaran nilai-nilai heteroseksual. Kemudian Giddens menambahkan bahwa dengan adanya fenomena ini, keintiman ditransformasikan menjadi sebuah bentuk negosiasi transaksional dari ikatan-ikatan personal oleh

orang-orang yang setara.²² Oleh karena itu, seksualitas masa kini memiliki makna yang sangat luas, meliputi hasrat-hasrat erotis, praktek-praktek dan identitas-identitas erotis. Ia tidak hanya terbatas pada kegiatan seksual saja, akan tetapi mencakup perasaan-perasaan dan hubungan seksual, cara bagaimana individu manusia dirumuskan atau ditentukan sebagai makhluk seksual oleh yang lainnya, maupun cara individu mendefinisikan dirinya sendiri menyangkut seksualitasnya.²³ Jackson dan Scott juga mengatakan bahwa seksualitas kini tidak dapat dibungkam lagi di dalam ruang isolasi karena ia tidak dapat dipahami seolah-olah terpisah dari hal-hal seperti relasi antar jenis kelamin, ideal-ideal budaya mengenai cinta atau institusi perkawinan dan beberapa turunan biologis, akan tetapi masalah-masalah dan perilaku seksual adalah juga masalah-masalah dan perilaku sosial.²⁴

Homoseksualitas dan Hedonisme

Pada era ini, dunia homoseksual terlihat sebagai dunia yang penuh dengan hura-hura dan kesenangan seks. Setelah peristiwa *Stonewall* di New York pada tahun 1969, kaum homoseksual, *lesbian* dan transeksual memperoleh eksistensi dirinya sebagai kaum yang berhak untuk

¹⁹ Sebagai contoh di Amerika Serikat pada tahun 1940-an dan 1950-an muncul *Mattachine Society*, *Homophile Action League*, dan *Janus Society* yang mempromosikan toleransi terhadap homoseksualitas. Mereka memiliki tujuan untuk mendukung sikap penerimaan terhadap kaum homoseksual bagi mereka yang anti-homoseksual., lihat Op.cit, Stephen Garton, hal. 219.

²⁰ Op.cit., Surya Monro, hal. 93.

²¹ Anthony Giddens, *Transformation of Intimacy: Seksualitas, Cinta dan Erotisme dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Fresh Book, 2004), hal. ix.

²² Ibid., hal. x.

²³ Stevi Jackson dan Sue Scott, "Sexual Skirmishes and Feminist Faction", dalam Op.cit., Jackson dan Scott, hal. 2.

²⁴ Ibid., hal. 2-3.

hidup berdampingan dengan komunitas lain. Turunan dari kaum homoseksual yaitu *Queens* dan *Sissies* mulai bertebaran dimana-mana dan mereka menyukai laki-laki heteroseks, pelaut, tentara atau pekerja-pekerja kantoran yang rapih dan wangi. Sementara kaum homoseks yang menunjukkan kegagahannya lebih memilih untuk pergi ke bar yang memiliki ruang-ruang gelap dan sauna. Indikasi-indikasi semacam ini, menyebar hampir ke seluruh dunia sehingga pada era-era 1960-an sampai 1980-an kehidupan kaum homo-seksual diidentikkan dengan disko, seks, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Yang lebih ekstrim bahwa semenjak diskotik dan bar khusus kaum homoseksual sudah tidak bisa lagi menjamin kesengan mereka, banyak dari kaum homoseks yang melakukan berbagai aktivitas seksualnya di tempat umum, seperti di taman dan toilet umum. Selain kehidupan mereka yang sangat identik dengan kesenangan seks, sebuah kecenderungan baru muncul yaitu banyaknya kaum homoseks yang melakukan *one-night stand* hanya untuk melakukan hubungan badan sesaat.

Karena aktifitas-aktifitas mereka yang begitu identik dengan seks dan minuman keras, maka kaum homoseks di tentang keras oleh siapa pun bahkan oleh institusi. Untuk menanggulangnya maka kaum homoseks mendirikan tempat-tempat khusus yang mereka namakan *Gay's Ghetto*. Tempat ini banyak didirikan di kota-

kota besar yang sudah maju seperti Amsterdam dan Kopenhagen pada tahun 1960-an, Inggris dan Jerman pada tahun 1970-an dan Spanyol pada tahun 1980-an. Setelah kejatuhan Uni Sovyet, maka pada tahun 1989-an banyak *Gay's Ghetto* yang didirikan di wilayah Eropa Timur. *Gay's Ghetto* kemudian memunculkan komunitas dan budaya urban sehingga untuk mengidentifikasi keberadaannya, mereka menciptakan dunianya sendiri.

Pada era 1990-an, dunia homoseksual lebih di tata kembali karena munculnya wabah AIDS sebagai wabah kematian yang ditenggarai oleh perilaku-perilaku homoseksual. Banyak media yang menyoroti wabah ini, sehingga gerakan-gerakan pembebasan kaum homoseksual, *lesbian* dan transeksual lebih menggiatkan misi mereka untuk menanggulangi wabah ini.

Di bidang pariwisata, tumbuh daerah-daerah pariwisata yang sangat terkenal dengan tujuan wisata khusus kaum homoseks, seperti Mykonos di Yunani, Sitges, dan pulau Ibiza di Eropa, Pulau Fire, dan pantai Miami di Amerika Serikat, Marula, Bali, dan Bangkok. Pada prinsipnya, kemunculan kaum homoseks, lesbian, dan transeksual memunculkan budaya urban perkotaan dengan identitas mereka yang beranekaragam. Kemunculan mereka di dalam sebuah komunitas juga diidentikkan dengan diterimanya refleksifitas diri mereka dalam satu lingkungan yang diwarnai

dengan norma-norma heteroseks dan membuat kesadaran baru bagi komunitas lain bahwa mereka juga memiliki identitas yang harus dihargai.

Homoseksualitas dan AIDS

Penyakit AIDS kemudian memunculkan mitos-mitos yang diberlakukan kepada para homoseksual, seperti tidak boleh berbagi gelas dengan para homoseks, berjabat tangan, dan lain-lain. Mitos-mitos ini disebarluaskan untuk membentuk suatu anggapan buruk atau stigma terhadap kelompok homoseksual yang telah dianggap menularkan penyakit ini. Mitos-mitos tersebut berlangsung sangat lama, hingga seorang ilmuwan kedokteran menemukan bahwa penyakit AIDS tidak ditularkan melalui perilaku semacam itu, akan tetapi ditularkan melalui darah dan sperma, oleh karena itu dianjurkan bagi kalangan homoseksual melakukan "seks yang aman" atau *safe sex* dalam berhubungan badan untuk menghindari penyakit ini.

Dengan adanya AIDS, hampir semua kelompok pembebasan kaum homoseksual di seluruh dunia menerapkan slogan *safe sex* dan mulai mendirikan pusat-pusat kesehatan khusus kaum homoseks, seperti *Gay Men's Health Crisis* di New York, *the San Francisco AIDS Foundation*, *the Terrence Higgins Trust* di London dan *AIDES* di Paris. Pendirian pusat-pusat krisis kesehatan bagi kaum homoseks ini menjamur karena lambarnya sikap pemerintah dalam menangani penya-

kit AIDS yang sudah menelan banyak korban jiwa, sehingga kelompok pembebasan kaum homoseks menyidiri pemerintah mereka masing-masing dengan slogan *Silence=Death* atau diam sama dengan kematian.

Slogan tersebut nampaknya membuat sadar pemerintah untuk menanggulangi penyakit AIDS ini, sehingga pada era 1990-an sudah banyak negara yang kelompok homoseksualnya bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas kesehatan. Koalisi ini bertugas untuk menanggulangi penyakit AIDS dan juga menyadarkan warga agar mereka tidak memiliki pandangan diskriminasi dan stigma terhadap kaum homoseksual. Mereka juga menyebarkan informasi melalui media dan menindak tegas rumah sakit-rumah sakit yang tidak mengikuti prosedur penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. Akan tetapi, keterlambatan penanganan penyakit ini membuat status AIDS berubah dari "kondisi fatal" ke "kondisi kronis" karena penemuan baru memperlihatkan bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kondisi ini memperlihatkan seluruh dunia sehingga cara yang paling aman untuk menghindari terjangkitnya penyakit AIDS yaitu dengan cara *safe seks*.

Walaupun AIDS dianggap sebagai penyakit yang mematikan, akan tetapi AIDS juga membawa dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain ditemukannya AIDS itu sendiri, penyakit ini juga membuat membenaran untuk menjelaskan

masalah seksualitas muncul ke publik. Banyak LSM dan media yang mulai membahas tentang masalah seksualitas, khususnya masalah homoseksual, sehingga membuat sadar masyarakat akan pentingnya slogan *safe sex* dengan menggunakan kondom. AIDS juga turut membuat kecemasan dan ketakutan terhadap LSM-LSM pembebasan kaum homoseksual dan *lesbian* karena AIDS dapat dijadikan senjata bagi semua pihak untuk mendiskreditkan dan mendiskriminasi keberadaan dan identitas mereka. Untuk menanggulangnya, senjata yang mereka gunakan adalah advokasi yang komprehensif dan holistik tentang pengetahuan homoseksual dan *lesbian*, serta memberitahukan kepada publik bahwa AIDS bisa menjangkiti siapa saja baik itu anak-anak, perempuan, orang tua dan laki-laki dengan tidak melulu melalui "media" seks.

Wacana Seksualitas dan Homoseksualitas di Belanda

Sebelum era 1960 tiba, Negeri Belanda adalah sebuah negara yang sangat *old-fashioned* dalam hal sosial, budaya dan politik karena hampir tidak ada konflik-konflik sosial dan politik yang berarti. Dalam masa-masa ini, masalah seksualitas seperti terbungkam sehingga memunculkan gerakan-gerakan bawah tanah yang ingin agar seksualitas bisa didiskusikan dan di bawa ke wilayah publik supaya tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap kaum minoritas seksual. Menurut Saskia Poldervaart, gerakan bawah tanah yang meng-usung

masalah-masalah seksualitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu gerakan yang utopian dan revolusioner. Bila kita melihat aktivitas dari kedua gerakan ini, maka akan terlihat perbedaan yang sangat jelas. Gerakan utopian lebih mencari makna seksualitas melalui nilai-nilai umum atau *common values* dan berusaha untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam kognisi masyarakat secara bertahap, sementara gerakan yang revolusioner justru lebih ingin segera memberantas diskriminasi melalui metode revolusioner.

Tahun 1965 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi Belanda karena pada tahun ini telah terjadi pemberontakan besar-besaran terhadap wacana seksualitas. Sebuah gerakan pembebasan yang menggabungkan ide-ide utopian dan revolusioner yaitu Provo muncul dan bekerja sama dengan kelompok feminis Belanda yang sangat terkenal yaitu Dolle Mina. Kedua kelompok ini mengadvokasi penentangan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, homoseksual dan lesbian. Selain itu, muncul pula gerakan pembebasan *Kabouters* yang juga mengadvokasi diizinkan pemakaian marijuana di depan publik sebatas tidak mengganggu kepentingan umum. Provo, Dolle Mina dan *Kabouters* melakukan aksinya di kota Amsterdam, sehingga Amsterdam menjadi semacam kota "bersejarah" dalam perjuangan hak-hak mereka. Keberhasilan kelompok-kelompok ini dalam memperjuangkan nasib mereka tentu tidak terlepas dari unsur pemerintah Belanda yang sangat toleran

dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka.

Menurut Gert Hekma, masalah seksualitas adalah salah satu masalah yang berhasil di advokasi dan diperjuangkan oleh mereka. Pada saat seksualitas bisa dijadikan wacana ilmiah di depan publik, maka banyak kaum perempuan dan laki-laki yang tidak tabu lagi membicarakan pengalaman seksual mereka tanpa perasaan bersalah, takut dan malu. Revolusi seksual yang terjadi di Belanda juga berhasil menjustifikasi identitas seksual sebagai sebuah identitas yang tidak berbeda dengan identitas-identitas lainnya.²⁵ Menurut Van Tricht, saat ini istilah *the personal is political* sangat terkenal di Belanda sebagai pembenaran bahwa seksualitas dapat menjadi sebuah wacana pribadi dan publik.²⁶

Sejak tahun 1970-an, wacana seksualitas di Belanda lebih mendapatkan tempat di hati rakyat karena wacana ini menoleransikan masalah-masalah aborsi, penggunaan alat kontrasepsi, pernikahan sebelum menikah, pornografi, prostitusi, dan homo-seksualitas. Pelegalisasian homoseksualitas Belanda dibawa oleh bangsa Perancis

melalui *The French Napoleonic Code*-nya yang dilaksanakan pada tahun 1811 dimana pada kode tersebut dinyatakan bahwa masalah ke-"liberal"-an homoseksualitas dijamin keberadaannya dalam sebuah kebijakan namun belum sampai kepada jenjang pernikahan.²⁷ Pada tahun 1879, seorang filsuf Swiss yaitu Pontus Wilkner mempublikasikan sebuah wacana yang berisi tentang kebebasan seksual dan pelegalisasian pernikahan sejenis. Seiring perkembangan jaman maka timbul gerakan homoseksual dan lesbian Belanda atau *The Dutch gay and lesbian movement* merupakan gerakan homoseks dan lesbian yang pertama kali dilakukan di benua Eropa yang diikuti hampir seluruh dunia.²⁸

Namun gerakan ini mendapat kritikan mulai tahun 1911 sampai

²⁷ Pelegalisasian tersebut juga terjadi di Jerman pada tahun 1813 akan tetapi pada tahun 1872, pemerintah Jerman mengadopsi pasal 175 yang menyatakan bahwa homoseksualitas adalah berupa suatu kejahatan, lihat www.geocities.com/edwardjbrown/gh.html diakses pada tanggal 19 November 2004.

²⁸ Oleh karena itu, di Belanda lebih banyak orang mengaku identitasnya sebagai gay daripada di Amerika Serikat atau Inggris. Dampaknya adalah timbul pemikiran individualistis kaum homoseks yang dikonotasikan dengan onanisasi, dimana mereka sudah tidak merasa bersalah lagi dengan kegiatan masturbasi di toilet-toilet umum, lihat Edward O. Laumann, John H. Gagnon, et.al, *The Social Organization of Sexuality : Sexual Practices in the United States*, (Chicago : University of Chicago Press, 1994), hal. 85 dan 293 - 294.

²⁵ Gert Hekma, *Het Verlies van de Onschuld : Seksualiteit in Nederland*, (Groningen : Wolters-Noordhof, 1990), hal. 117.

²⁶ Jens van Tricht, *Van de Tweede Golf Naar de Derde Golf? En Wat Doen Mannen Eraan? De Kraakbeweging Langs de Feministische Meetlat. Een Leeronderzoek naar de Gemengde Seksisme-Diskussie in Drie Bladen van de Kraakbeweging in de Periode 1988-1993*, (Amsterdam : Vrouwenstudies, 1993), hal. 28.

tahun 1940 terutama oleh gereja Katolik Roma dan Nazi yang pada saat itu sedang menguasai Belanda. Akan tetapi setelah Perang Dunia II berakhir, gerakan ini mengalami kejayaannya karena lingkungan Belanda yang sangat menerima struktur masyarakat minoritas.²⁹ Kaum homoseksual di Belanda ingin agar mereka memiliki hak-hak yang sama seperti kaum negro, Yahudi, dan perempuan.³⁰ Sejak tahun 1970-an, Belanda terkenal dengan negara yang paling membuka dirinya untuk masalah-masalah perilaku, seperti pelegalisasian aborsi, seks pra nikah, pornografi, prostitusi, dan homoseksualitas.³¹ Hal ini dikarenakan masyarakat Belanda yang percaya akan adanya hubungan cinta yang seimbang di antara dua insan manusia meskipun sesama jenis.

Setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang, maka pemerintah Belanda mulai melakukan rekonstruksi aktifitas-aktifitas yang menurut mereka termasuk dalam pendiskriminasi kaum homoseksual. Pada tahun 1974, pemerintah Belanda sudah meingizinkan kaum homoseksual untuk dapat masuk ke dalam ranah militer, dan pada tahun 1980-an, kaum homoseksual mulai diperbolehkan untuk mengadakan parade homo di Amsterdam di bawah pengawasan polisi.

Menanggapi masalah homoseksualitas di Belanda, konstitusi Belanda yang di revisi pada tahun 1982 merupakan konstitusi yang paling modern di dunia. Konstitusi ini menjustifikasi homoseksualitas sebagai kelompok yang harus dihormati. Pada artikel I Konstitusi Belanda dijelaskan tentang prinsip non-diskriminasi. Pada prinsip tersebut dinyatakan bahwa tidak diperbolehkannya prinsip diskriminasi terhadap semua umat manusia termasuk perempuan, kelompok homoseksual dan pasangan-pasangan yang tidak menikah. Setiap individu berhak untuk tidak didiskriminasi oleh institusi manapun karena bagi institusi yang melakukan diskriminasi maka institusi tersebut tidak akan disubsidi oleh pemerintah. Bagi institusi yang tetap melakukan diskriminasi, hal tersebut disahkan oleh pemerintah asalkan diskriminasi yang dilakukan tidak sampai menyakiti yang terdiskriminasi. Ironisnya khusus bagi gereja-gereja Katolik di

²⁹ www.galha.freeseerve.co.uk/glh/113/netherlands.html diakses pada tanggal 19 November 2004

³⁰ Mereka bahkan mengatakan bahwa ketika kita menengok sejarah, maka tidak ada satu peradaban pun yang tidak ada budaya tanpa kaum homoseksual, seperti di dalam kebudayaan Yunani, Romawi, bahkan di dalam kebudayaan kaum Indian Amerika, lihat Seymour Krim, "Revolt of the Homosexual", dalam Jeffrey Escoffier, Loc.cit, hal.469.

³¹ Satu hal yang tidak bisa pemerintah Belanda legalkan adalah masalah seks anak-anak, seperti pornografi dan prostitusi pada anak, lihat Gertjan Zessen dan Theo Sandfort, *Seksualiteit in Nederland: Seksueel Gevrag, Risico en Preventie van AIDS*, (Amsterdam : Swets, 1991), hal. 102.

Belanda, ia diperbolehkan untuk mendiskriminasi perempuan, kelompok homoseksual dan pasangan yang tidak menikah dengan aturan-aturan gereja Katolik itu sendiri.

Artikel lain yang menjelaskan tentang penentuan nasib sendiri adalah artikel 10 yang memberikan garansi terhadap hak pribadi dan artikel 11 yang menjelaskan tentang hak terhadap kebebasan integritas tubuhnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak diperbolehkannya aktifitas pemaksaan untuk pemeriksaan HIV/AIDS bagi siapapun pada umumnya dan bagi kelompok homoseksual pada khususnya.

Dari artikel-artikel yang telah disebutkan di atas, maka jelas terlihat bahwa Belanda telah memiliki tradisi yang lama tentang integrasi kelompok-kelompok minoritas termasuk kelompok homoseksual. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa komunitas di Belanda secara langsung dan tidak langsung telah menciptakan tumbuhnya penghormatan terhadap kelompok-kelompok minoritas untuk dapat hidup secara damai dan berdampingan satu sama lain.

Seputar Perdebatan Perumusan Undang-undang Pernikahan Sejenis di Belanda

Pada dasarnya, sejarah toleransi Belanda sudah ada sejak abad ke 17 dan 18, pada saat Belanda menikmati masa-masa kejayaan emasnya. Pada abad ke-19 dan 20, toleransi Belanda berubah menjadi toleransi yang

dikotak-kotakkan atau polarisasi. Kebijakan ini dibuat untuk memberi ruang otonomi penuh terhadap aliran-aliran dan kelompok-kelompok yang ada dengan cara mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka dalam kebijakan yang berbeda-beda. Era 1960-an menjadi titik jatuhnya polarisasi, sehingga Belanda menjadi negara yang paling sekuler di kawasan Eropa. Polarisasi jatuh dikarenakan adanya revolusi kebudayaan dimana pada saat itu kelompok-kelompok minoritas merasa tidak dihormati dan dihargai identitasnya oleh kelompok agama. Kelompok minoritas mendobrak kebijakan gereja yang pada saat itu bisa dikatakan sudah "sekuler" untuk bisa lebih menghormati identitas kelompok-kelompok minoritas.³²

Salah satu kelompok yang mendobrak adalah kelompok minoritas seksual, yaitu kelompok homoseksual. Kelompok ini menginginkan adanya perwujudan sejumlah kebijakan yang lebih riil oleh pemerintah Belanda, misalnya diberlakukannya Undang-undang Pernikahan Sejenis. Sebenarnya isu diberlakukannya undang-undang ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sejak tahun 1989, akan tetapi masih banyak kelompok yang belum bisa menerimanya terutama kelompok agamawan. Pada permulaan tahun 1990-an, undang-undang ini mulai disosialisasikan oleh

³² "Going Dutch?" dalam *Majalah Minggu Standard*, Volume 009, No. 36, tanggal 31 Mei 2004.

kelompok aktivis pembebasan homoseksual dan dinyatakan berhasil oleh pemerintah Belanda walaupun pertentangan oleh kelompok agamawan masih terus dilancarkan. Sejak keberhasilan ini, maka pemerintah Belanda mengizinkan adanya pasangan tercatat atau *registered partnerships* di setiap kantor-kantor catatan sipil dan belum melegalkan pernikahan sesama jenis.

Pada tahun 1996, Majelis Rendah Belanda mulai merumuskan Undang-Undang Pernikahan sejenis dengan menggunakan prinsip otonomi penuh warga negara, kebebasan, dan kesamaan. Akan tetapi perumusan ini tidak terlepas dari debat kontra yang dilakukan oleh segelintir kelompok ataupun partai politik. Partai politik yang pada saat itu tidak setuju dengan perumusan undang-undang tersebut adalah partai SGP yaitu partai kecil berbasis agama yang dipimpin Cees van der Staaij. Van der Staaij menyatakan bahwa prinsip otonomi dan kesamaan tidak bisa dijadikan alasan perumusan undang-undang tersebut karena prinsip tersebut hanya dapat dikenakan kepada pasangan-pasangan heteroseks atau yang yang dianggap oleh Van der Staaij sebagai pasangan normal.

Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa apabila Undang-Undang Pernikahan Sejenis tersebut jadi dilaksanakan, ia mempertanyakan kembali tentang status hukum anak yang akan diadopsinya dan mengkritisi bahwa pernikahan sesama jenis adalah pernikahan yang merendah-

kan norma-norma pernikahan yang sesungguhnya. Debat ini kemudian di bantah oleh seorang kolumnis bernama Cees van der Pluijm dari surat kabar Gay yaitu *De Gay Krant*. Van der Pluijm mengatakan bahwa apabila prinsip tersebut dapat dilaksanakan secara adil oleh pasangan-pasangan heteroseksual, seharusnya pasangan-pasangan homoseksual juga dapat menikmatinya. Pernyataan ini kemudian dibarengi dengan pernyataan setuju dari anggota partai VVD yaitu Otto Vos yang menyatakan bahwa prinsip dasar dari sebuah pernikahan adalah adanya *telos* dan cinta di antara dua insan manusia, baik itu pasangan heteroseksual ataupun pasangan homoseksual.³³

Meskipun perdebatan pro dan kontra seputar perumusan Undang-Undang Pernikahan Sejenis terus berlanjut, pada akhirnya Perdana Menteri Wim Kok yang saat itu sedang berkuasa mengizinkan undang-undang tersebut keluar sekaligus melegalkan pernikahan sesama jenis. Dikeluarkannya undang-undang ini juga membuat pro dan kontra kalangan internasional khususnya di Eropa, karena dengan demikian negeri Belanda-lah negara pertama di Eropa yang melegalkan adanya pernikahan sesama jenis dengan dikeluarkannya *Same-Sex Marriage Policy* sekaligus dengan hak tunjangan sosial dan hak mengadopsi anak.

³³ Ibid.

Menarik bila kita menyimak pernyataan Perdana Menteri Kok bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang ini, maka Belanda yang menjadi "pemimpin" di Eropa di lihat dari sudut pandang demokratisasi, liberalisme, otonomi diri, kebebasan, dan kesamaan.

Kok juga menjelaskan dengan penuh keyakinan bahwa nantinya perlahan-lahan hukum yang digunakan untuk melegalkan pernikahan sejenis juga akan digunakan oleh negara-negara lain dalam menjustifikasi kelompok homoseksualnya.³⁴ Pernyataan Kok ini menyiratkan bahwa Belanda sebagai negara pelopor kebebasan dan demokrasi secara implisit ingin memarketisasi undang-undangnya tersebut agar diikuti negara-negara lain.

Pernyataan lain mengenai marketisasi implisit ini juga dinyatakan Fred Bruinsma – seorang profesor sosiologi hukum dari Universitas Utrecht, bahwa setiap negara memiliki nilai-nilai moral dan kebebasannya sendiri yang harus mereka ikuti, akan tetapi apabila nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan masalah kriminalitas maka tidak akan terbentuk suatu toleransi yang sempurna seperti di Belanda. Pernyataan ini sangat memiliki makna marketisasi implisit

karena Bruinsma mengatakan adanya kesempatan toleransi yang dimiliki Belanda dan dampak dari pernyataan ini adalah timbulnya gerakan-gerakan pembebasan kelompok homoseksual gelombang modern berikutnya yang menginginkan adanya perwujudan hak-hak mereka.³⁵

Dilegalkannya Undang-undang Pernikahan Sejenis di Belanda

Pada April 1996, Parlemen Belanda menyetujui dua resolusi paling penting. Resolusi pertama berhasil dilewati dengan suara bulat 81 melawan 60 suara, dimana resolusi ini menjustifikasi adanya hubungan homoseksual dan *lesbian* sekaligus juga menjustifikasi keobjektifan pernikahan sesama jenis. Resolusi kedua berhasil dilewati oleh Parlemen Belanda dengan suara yang juga bulat yaitu 83 melawan 58 suara dimana resolusi ini menjustifikasi legalitas hak-hak mengadopsi anak bagi pasangan homoseksual yang sudah menikah. Kemenangan penjustifikasian legalitas bagi pasangan homoseksual ini dikatakan sebagai kemenangan moralitas oleh kelompok pembela hak-hak homoseksual Belanda. Koran Gay Belanda, *De Gay Krant* juga mengatakan bahwa komunitas-komunitas

³⁴ "Dutch Gay Marriage Legalised", dalam www.rnw.nl/hotspots/html/netherlands000908.html, diakses pada tanggal 27 Oktober 2004, pada pukul 01.00 AM.

³⁵ "The Year 2000: Liberal Legislation in the Netherlands", dalam <http://rnw.nl/hotspots/html/netherlands001229.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2004, pada pukul 01.15 AM.

homoseksual di Belanda tidak ingin melakukan perayaan pernikahan homoseksual setengah-setengah seperti di Denmark. Mereka ingin melakukan perayaan pernikahan homoseksual secara utuh karena menurut mereka apabila pasangan heteroseksual dapat melakukannya secara legal dan utuh maka seharusnya pasangan-pasangan homoseksual juga dapat melakukannya secara sama.

Kemudian pada bulan Desember 1996, Majelis Rendah Belanda berhasil melegalkan hukum pendaftaran bagi pasangan sejenis dengan suara bulat 104 melawan 46. Sejak dilegalkannya pendaftaran ini, maka mulai tanggal 1 Januari 1998, pasangan-pasangan homoseksual dan lesbian mulai mendaftarkan dirinya sebagai pasangan yang terdaftar atau *registered partnerships* untuk mendapatkan hak-haknya termasuk hak cerai, kecuali hak untuk mengadopsi anak. Sejak banyaknya pasangan homoseksual yang mendaftarkan dirinya, maka Parlemen Belanda menginstruksikan pemerintahnya yang sedang berkuasa untuk menyiapkan legislasi perizinan pernikahan pasangan sesamajenis dibawah hukum yang pasti.

Pada bulan September 2000, Majelis Rendah Belanda meyetujui pelegalan pernikahan secara sah bagi warga negara Belanda sekaligus dengan perangkat pengenaan hak-hak adopsi dan perceraian. Bagi mereka yang bukan warga negara Belanda tetapi memiliki izin tinggal di Belanda juga

dapat menikah secara legal dan sah di Belanda. Penyetujuan pernikahan secara legal ini di tentang oleh anggota partai AGP, yaitu Cees van der Staaij dimana ia menyatakan bahwa pelaksanaan hukum tersebut akan membawa Belanda menjadi negara yang terisolasi di seluruh dunia. Akan tetapi, penentangan ini tidak membawa diamandemenkannya kebijakan tersebut.

Pada bulan Desember 2000, Majelis Rendah Belanda berhasil menjustifikasi satu peraturan yang cukup kontroversial yaitu hak mengadopsi anak. Dengan diizinkan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak secara hukum yang berlaku, maka Belanda adalah satu-satunya negara di dunia yang melegalkan pasangan sejenis untuk dapat merawat anak. Seorang juru bicara kelompok pembela hak-hak homoseksual yaitu Onno Hoes menyatakan bahwa dengan demikian Belanda adalah negara yang mereduksi makna pernikahan dengan tidak melihat perbedaan gender dan status kewarganegaraan.

Dengan adanya pelegalan pernikahan sesama jenis beserta hak-haknya dan diizinkan mereka untuk mengadopsi anak, maka pada Maret 2000 Parlemen Eropa membuat resolusi untuk merekomendasikan pasangan sesama jenis untuk mendapatkan hak-hak yang sama seperti pasangan heteroseksual di semua aturan yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Pemilihan suara ini meng-

hasilkan suara sebesar 265 melawan 125 oleh 15 negara anggota Uni Eropa dengan 33 suara menolak dan abstain. Alasan penolakan dan abstain tersebut dinyatakan oleh:

1. Dewan Katolik Vatikan mengatakan bahwa seharusnya seluruh anggota masyarakat dunia dan khususnya anggota Parlemen-Parlemen Katolik tidak memilih dan menyetujui kebijakan ini karena menentang kodrat dari manusia. Penyetujuan dan pelegalan undang-undang ini akan merusak mental dan moral warga negara dunia.
2. Seorang anggota keuskupan di Skotlandia menyatakan bahwa seharusnya warga dunia yang beragama Katolik mengikuti kekuasaan tertinggi Vatikan karena posisi gereja dan agama Katolik sudah signifikan dalam melarang umatnya untuk berpasangan sesama jenis.

Legalisasi Undang-undang Pernikahan Sejenis di Belgia dan Spanyol

Kebijakan Undang-undang Pernikahan Sesama Jenis pertama kali diberlakukan di daerah Belgia yang berbahasa Belanda yaitu di daerah Vlanderen oleh kelompok homoseksual dan lesbian, yaitu *Holebifederatie*. Pernikahan sesama jenis ini juga memberlakukan hak-hak yang sama seperti layaknya pasangan heteroseksual. Disahkannya pernikahan sejenis ini dikarenakan kalahnya

partai politik Katolik dan partai politik Kristen Sosial pada 1999 sehingga pemerintah Belgia mempunyai celah untuk memperluas makna pernikahan.

Usulan diberlakukannya kebijakan ini pertama kali dinyatakan oleh mantan Menteri Kesehatan Belgia yaitu Magda Aelvoet. Setelah usulan-usulan tersebut diterima oleh pemerintah Belgia, maka parlemen Belgia mulai merumuskan undang-undang ini dengan tidak membuat terpisah kebijakan pernikahan antara pasangan heteroseksual dengan pasangan homoseksual, melainkan diberlakukannya peraturan-peraturan yang sama. Perbedaan yang sangat mencolok antara Belanda dan Belgia adalah di Belgia tidak diizinkan pasangan homoseksual untuk mengadopsi anak setelah pernikahan berlangsung, sementara di Belanda, pasangan homoseksual memiliki hak penuh dalam mengadopsi anak³⁶. Masalah hak mengadopsi anak ini membuat resah kelompok pembebasan homoseksual karena meskipun pemerintah Belgia melegalkan pernikahan sesama jenis, namun pasangan homoseksual belum memiliki otonomi penuh dalam mengekspresikan hak-haknya dan itu sama saja dengan tindakan represif pemerintah terhadap kelompok minoritas seksual.

³⁶ "Same-Sex Marriage in Belgium", dalam www.religioustolerance.org/hom_mar10.htm diakses pada tanggal 15 September 2005, pada pukul 4.58 PM.

Pada 1 Oktober 2004, pemerintah Belgia mengamandemenkan kebijakan pernikahan sesama jenisnya dengan mengizinkannya pasangan yang bukan warga negara Belgia untuk melakukan pernikahan secara legal asalkan salah satu pasangannya telah tinggal di Belgia sekurang-kurangnya tiga bulan. Dengan adanya peraturan baru ini, pada tanggal 22 November 2004, lebih dari 300 pasangan sesama jenis melakukan pernikahan legal di Belgia. Data mencatat bahwa pernikahan sesama jenis terbanyak di Belgia adalah pada tanggal 25 Juli 2005 dimana menikah pasangan sesama jenis sebanyak 2.442 pasangan dan diperkirakan sebanyak 3% dari penduduk Belgia menikah sesama jenis.³⁷ Karena banyaknya pasangan sesama jenis yang menikah di Belgia, akhirnya pemerintah Belgia mengizinkan pengadopsian anak pada awal tutup tahun 2005 ini.

Tentang diberlakukannya undang-undang ini, seorang pengacara Amerika dan anggota dari Aliansi Internasional Gay dan Lesbian yang berbasiskan di Brussel, Don Bisson, menyatakan bahwa kini di Belgia unsur agama tidak bermain lagi di dalam ranah politik seperti yang masih terjadi di Amerika Serikat. Pemerintah Belgia tidak ingin agama [gereja] mendikte kehidupan warga

negaranya.³⁸ Keliberalan pemikiran masyarakat Belgia juga terlihat dari pemikiran seorang purnawirawan tentara, Jean-Pierre Hulpiau yang menyatakan bahwa secara kodrat pasangan sesama jenis memang menyalahi hukum alam, akan tetapi setiap orang memiliki hak untuk bebas dan melakukan apa yang diinginkan sepanjang hal itu dilegalkan.³⁹ Sementara itu seorang editor majalah Belgia yang berbahasa Belanda, Krol juga mengatakan bahwa saat ini Belgia diwarnai dan dipengaruhi berbagai macam kebudayaan, oleh karena itu Belgia juga berhak untuk memiliki undang-undangnya sendiri seperti undang-undang *euthanasia* dan undang-undang penggunaan obat-obatan terlarang.⁴⁰

Begitu pula di Spanyol, pemberlakuan Undang-Undang Pernikahan Sesama Jenis pada pertengahan tahun 2005 di Spanyol sangat mengejutkan kalangan internasional karena ternyata Spanyol yang memiliki tradisi Katolik kuat, berhasil melegalkan pernikahan sesama jenisnya, sekaligus dengan hak-hak yang didapat setiap pasangan homoseksual seperti di Belanda dan Belgia. Tentu saja diberlakukannya undang-undang ini

³⁷ www.buddybuddy.com/mar-belg.html diakses pada tanggal 3 September 2005, pada pukul 10.30 PM.

³⁸ "The Battle Over Same-Sex Marriage", dalam www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a2004/03/15/MNG275KMPE1. DTL diakses pada tanggal 3 September 2005, pada pukul 10.50 PM.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

sangat mengundang kontroversi di Spanyol khususnya dari kelompok agama Katolik. Walaupun terjadi kontroversi, pemerintah Spanyol yang saat itu dipimpin Perdana Menteri José Luis Rodríguez Zapatero berhasil memberlakukan kebijakan tersebut dengan pemilihan suara sebanyak 186 melawan 147 suara. Hal ini juga sangat signifikan dengan *polling* suara warga Spanyol yaitu 62% melawan 30% yang setuju dan mendukung penuh diberlakukannya undang-undang tersebut.⁴¹ Pemberlakuan undang-undang ini di Spanyol tentunya membuat *geram* penguasa tinggi agama Katolik di Vatikan yaitu Paus Benedictus karena menurutnya Spanyol adalah negara yang taat menjalankan nilai-nilai dan norma-norma Katoliknya. Ia mengatakan bahwa pemberlakuan Undang-undang Pernikahan Sejenis di Spanyol sama saja dengan kebebasan yang anarki dan mengancam makna keluarga di masa depan.⁴² Vatikan juga menentang keras tata cara pengadopsian anak bagi pasangan homoseksual dan mengatakan bahwa seorang anak tidak diproduksi dari sebuah pabrik ataupun di adopsi oleh pasangan sesama jenis melainkan dihasilkan oleh hubungan prokreasi

dan lebih pantas diadopsi oleh pasangan perempuan dan laki-laki.⁴³ Sementara itu, menurut salah seorang petinggi negara Spanyol, Javier Leon de la Riva mengatakan bahwa ia sangat memaklumi apabila ada pasangan sesama jenis, akan tetapi ia sangat tidak bisa memaklumi apabila pasangan sejenis tersebut dilegalkan dalam bentuk pernikahan sesama jenis.⁴⁴

Zapatero adalah Perdana Menteri yang sangat mendukung kebijakan ini karena ia sangat yakin dengan apa yang telah ia lakukan. Dengan lantang Zapatero berpidato bahwa Spanyol adalah memang bukan negara pertama yang memberlakukan kebijakan ini, namun setelah Spanyol, ia yakin bahwa nantinya akan ada negara-negara lain yang juga memberlakukan undang-undang ini. Zapatero juga mengatakan bahwa saat ini Spanyol sudah menjawab semua kegundahan dan kegelisahan komunitas-komunitas yang dimarjinalkan, dikriminalisasikan, didiskriminasi, dan ditekan sehingga sebagai "balas jasa"-nya, maka pemerintah Spanyol memberikan *grants* dengan cara menghormati, menghargai dan mewujudkan hak-hak mereka dalam sebuah kebijakan.⁴⁵ Ia

⁴¹ Andy Humm, "Spain Legalizes Gay Marriage", dalam *The Villagers*, Volume 75, No. 8, 13 - 20 Juni 2005.

⁴² Jennifer Green, "Spain Legalizes Same-Sex Marriage", dalam *The Washington Post*, Jumat, 1 Juli 2005, hal. A14.

⁴³ "Spain Approves Gay Marriage, Adoption", dalam www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1560626,00.html diakses pada tanggal 2 Desember 2005, pada pukul 7.20 PM.

⁴⁴ Op.cit., Andy Humm.

⁴⁵ Ibid.

juga menambahkan bahwa kemenangan kelompok minoritas seksual adalah kemenangan semua warga negara Spanyol dan kemenangan kebebasan di Spanyol.⁴⁶ Seorang aktivis homoseksual Spanyol, Emma Avita, mengatakan bahwa sekarang mereka sudah bebas dan tidak distigmakan lagi sebagai kelompok yang datang dari planet luar. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, maka pemerintah Spanyol mengaman-demikan undang-undang pernikahannya dengan merubahnya menjadi, sebuah pernikahan akan sama persyaratannya baik itu dilakukan oleh pasangan lain jenis ataupun pasangan sesama jenis.⁴⁷

Kesimpulan

Negara yang memiliki masyarakat yang multikultural dan heterogen dalam demokrasi liberal, biasanya memiliki kelompok-kelompok tersendiri, baik itu kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, termasuk kelompok minoritas seksual seperti kelompok homoseksual, *lesbian* dan transeksual. Dalam perwujudannya, seringkali kita melihat bagaimana kelompok minoritas seksual ini dijadikan kambing hitam oleh kelompok mayoritas bahkan oleh pemerintahnya sendiri. Kelompok minoritas ini selalu didiskriminasi oleh kelompok yang lebih unggul karena kelompok ini

tidak memiliki otonomi diri penuh, sehingga konflik-konflik sosial, budaya, ekonomi dan bahkan politik terkadang tidak bisa dihindari.

Kondisi-kondisi ini menghalangi kesuksesan dari kelompok-kelompok minoritas seksual tersebut. Sebagai dampaknya, kelompok-kelompok ini menghendaki agar pemerintah mengakomodasi kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut secara adil dan merata dan yang perlu ditekankan dari kemunculan kelompok-kelompok minoritas seksual tersebut adalah kesamaan kebebasan dan kesamaan kesempatan yang adil. Oleh karena itu, setiap kelompok berhak untuk menuntut hak-haknya yang bertujuan untuk melindungi mereka dari terpaan diskriminasi.

Negeri Belanda sebagai pelopor diberlakukannya kebijakan Undang-undang Pernikahan Sesama Jenis, mungkin dapat dikatakan sebagai negara yang pertama kali di dunia mengakomodir kelompok minoritas seksualnya. Belanda berhasil menjustifikasi keberadaan dan kepentingan kelompok homoseksualnya dengan kebijakan-kebijakannya walaupun banyak mendapat tantangan. Apa yang telah dilakukan Belanda, dapat dipandang sebagai kekuatan Belanda dalam memarketsasi nilai demokrasi liberalnya secara laten ke Eropa pada khususnya dan ke seluruh dunia pada umumnya, walaupun Amerika dan Kanada juga telah melakukan kebijakan yang sama.

Secara kasat mata, kita dapat

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Loc.cit., "Spain Approves Gay Marriages; Adoption".

melihat bagaimana Belanda yang sudah begitu maju dalam mengakomodir hak-hak dan kepentingan-kepentingan kelompok minoritas seksualnya, seperti kelompok homoseksual, lesbian, biseksual dan transeksual. Hal ini terjadi karena menjelang tahun 1960-an, bermunculan kelompok-kelompok liberal radikal yang memperjuangkan masalah-masalah perempuan dan seksualitas. Kelompok-kelompok ini secara umum memiliki tujuan untuk membuka perbatasan nilai-nilai seksualitas heteroseksual menjadi lebih dihargainya nilai-nilai non-heteroseksual. Alasan inilah yang membuat masyarakat Belanda mulai menerima nilai-nilai berbeda dan dipraktekan di dalam kehidupan mereka.

Masalah homoseksualitas yang dianggap tabu untuk didiskusikan oleh sebagian besar negara-negara di dunia, sudah menjadi wacana yang umum untuk dianalisa bahkan dijadikan sebagai bahan penelitian. Wacana homoseksualitas di Belanda telah diejawantahkan melalui beberapa pasal di dalam Konstitusi Belanda yang di revisi pada tahun 1982. Pada prinsipnya, dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi manapun tidak diizinkan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap semua umat manusia termasuk perempuan, kelompok homoseksual dan lesbian dan pasangan-pasangan yang tidak menikah. Selain itu, konstitusi Belanda juga menjelaskan ada-

nya penentuan nasib sendiri terhadap semua umat manusia, sehingga tindakan represif atau tindakan menekan yang dikenai oleh kelompok manapun menjadi tindakan yang melanggar hukum. □

BIBLIOGRAFI

BUKU, MAJALAH, DAN SURAT KABAR

- Alimi, Moh Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, Yogyakarta : LKIS, 2004.
- Amstrong, John, *Conditions of Love, The Philosophy of Intimacy*, England : Penguin Books, 2002.
- Altman, Dennis, "Liberation: Toward the Polymorphous", dalam Jeffrey Escoffier, (ed.), *Sexual Revolution*, New York : Thunder's Mouth Press, 2003.
- Bayer, Ronald dan Gerard M. Oppenheimer, *AIDS: Voices from the Epidemic Doctors*, New York : Oxford University Press, 2000.
- Binnie, Jon, *The Globalization of Sexuality*, SAGE : London, 2004.
- Duberman, Martin, *Stonewall*, New York : Dutton, 1993.
- Foucault, Michel, *Seks dan Kekuasaan, Sejarah Seksualitas*, terj. Rahayu S. Hidayat, Jakarta : Gramedia, 2000.
- Fromm, Erich, *The Art of Loving*, terj. Syafi' Alie'ha, Jakarta : Fresh Book, 2004.
- Garton, Stephen, *Histories of Sexuality, Antiquity to Sexual Revolution*, London : Equinox, 2004.
- Giddens, Anthony, *Transformation of Intimacy : Seksualitas, Cinta dan Eritisme dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : Fresh Book, 2004.

"Going Dutch?", dalam *Majalah Standard*, Volume 009, No. 36, tanggal 31 Mei 2004.

Gefrag, Risico en Preventie van AIDS, Amsterdam : Swets, 1991.

Green, Jennifer, "Spain Legalizes Same-Sex Marriage", dalam *The Washington Post*, Jumat, 1 Juli 2005, hal. A14.

WEBSITE

www.wordiq.com/definition/Sexual_revolution> diakses pada tanggal 21 November 2004

Hekma, Gert, *Het Verlies van de Onschuld : Seksualiteit in Nederland*, Groningen : Wolters-Noordhof, 1990.

www.geocities.com/edwardtjbrown/gh.html> diakses pada tanggal 19 November 2004.

Humm, Andy, "Spain Legalizes Gay Marriage", dalam *Majalah Mingguan The Villagers*, Volume 75, No. 8, 13 - 20 Juni 2005

www.galha.freemove.co.uk/glh/113/netherlands.html> diakses pada 19 November 2004

Laumann, Edward O, JohnH. Gagnon, et.al, *The Social Organization of Sexuality : Sexual Practices in the United States*, Chicago : University of Chicago Press, 1994.

www.rnw.nl/hotspots/html/netherlands000908.html>, diakses pada 27 Oktober 2004.

Monro, Surya, *Gender Politics, Citizenship, Activism and Sexual Diversity*, London : Pluto Press, 2005.

The Year 2000: Liberal Legislation in the Netherlands", dalam <<http://rnw.nl/hotspots/html/netherlands001229.html>>, diakses pada 27 Oktober 2004

Nope, C.Y. Marselina, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*, Yogyakarta : Resist Book, 2005.

www.religioustolerance.org/hom_mar10.htm>, diakses pada 15 September 2005

Tricht, Jens van, *Van de Tweede Golf Naar de Derde Golf? En Wat Doen Mannen Eraan? De Kraakbeweging Langs de Feministische Meelst. Een Leeronderzoek naar de Gemengde Seksisme-Diskussie in Drie Bladen van de Kraakbeweging in de Periode 1988 - 1993*, Amsterdam : Vrouwenstudies, 1993.

www.buddybuddy.com/mar-belg.html>, diakses pada 3 September 2005

<http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a2004/03/15/MNG275KMPE1.DTL>>, diakses pada 3 September 2005

Zessen, Gertjan dan Theo Sandfort, *Seksualiteit in Nederland : Seksueel*

www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1560626,00.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2005